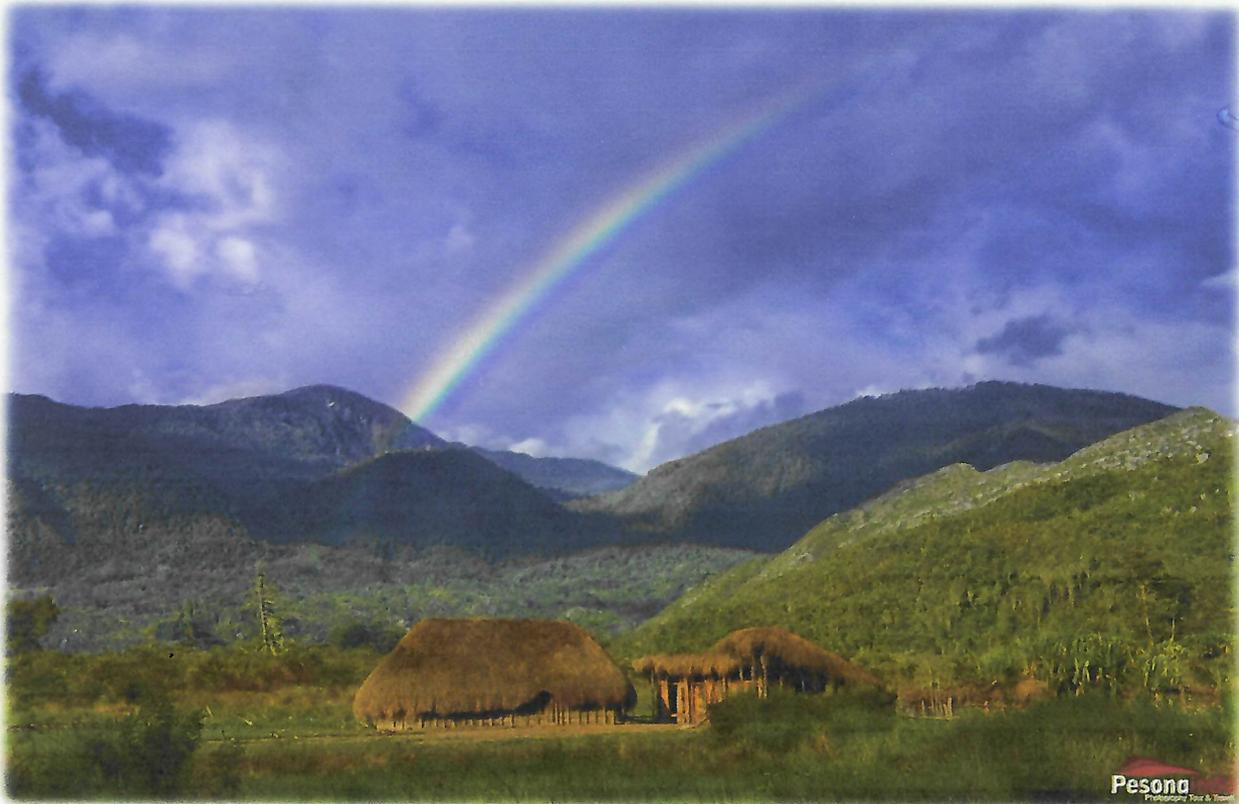




**LAPORAN KEGIATAN BPP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
BULAN MEI TAHUN 2025**



TIM PENYUSUN

BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pengarah	:	Hantor Matuan, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Polhukam	:	Fransiscus Elosak, S.H., M.H
Anggota Kelompok Kerja Papua Cerdas	:	Paul Wetipo, S.Pd
Anggota Kelompok Kerja Papua Sehat	:	Gaad Piranid Tabuni, SP., M.M.
Anggota Kelompok Kerja Papua Produktif	:	Yoyo Iwik Sriyoto, S.Sos., M.Si
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Meisly Mariana Kombong, S.AP.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Otniel Elokpere, S.Pd.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Teo Aprianus Dini

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA.....	1
TIM PENYUSUN	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Ringkasan Kelembagaan	5
1.3.1 Definisi	5
1.3.2 Struktur Kelembagaan	6
1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan	6
1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja	7
BAB II PEMBAHASAN	8
2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan	8
2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan	15
2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan	16
2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan.....	24
2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan.....	27
BAB III PENUTUP.....	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi khusus dilaksanakan dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap Hak Asasi khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Otonomi Khusus di Papua telah memasuki babak baru. Setelah berjalan 20 tahun, Pemerintah Pusat melanjutkan pemberian Otonomi Khusus bagi Papua dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan pada Pasal 68A bahwa perlu dibentuk badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Dalam menjalankan amanat tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua (BPP).

Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan SHEK dalam pelaksanaan Otsus Papua. Badan tersebut diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta satu orang Perwakilan OAP dari setiap Provinsi Papua DOB Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu dalam pelaksanaannya, akan dibantu pula oleh Sekretaris Eksekutif di Jakarta dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berlokasi di Papua, Kelompok Kerja, serta Kelompok Ahli. Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat, seperti kompleksitas koordinasi antara lembaga dan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi.

Arah percepatan pembangunan telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Rencana induk tersebut memuat berbagai target dengan capaian dan dampak yang terukur. Agar pelaksanaan tugas BPP dapat sejalan dengan rencana induk, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Program Kerja BPP. Rencana kegiatan dan program kerja ini memuat Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum dan ringkasan kelembagaan, Bab II yang terdiri atas target outcome, rencana kegiatan dan program kerja, serta Bab III Penutup. Rencana kegiatan dan program kerja menjadi acuan bagi Badan Pengarah Papua, khususnya bagi Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas SHEK percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

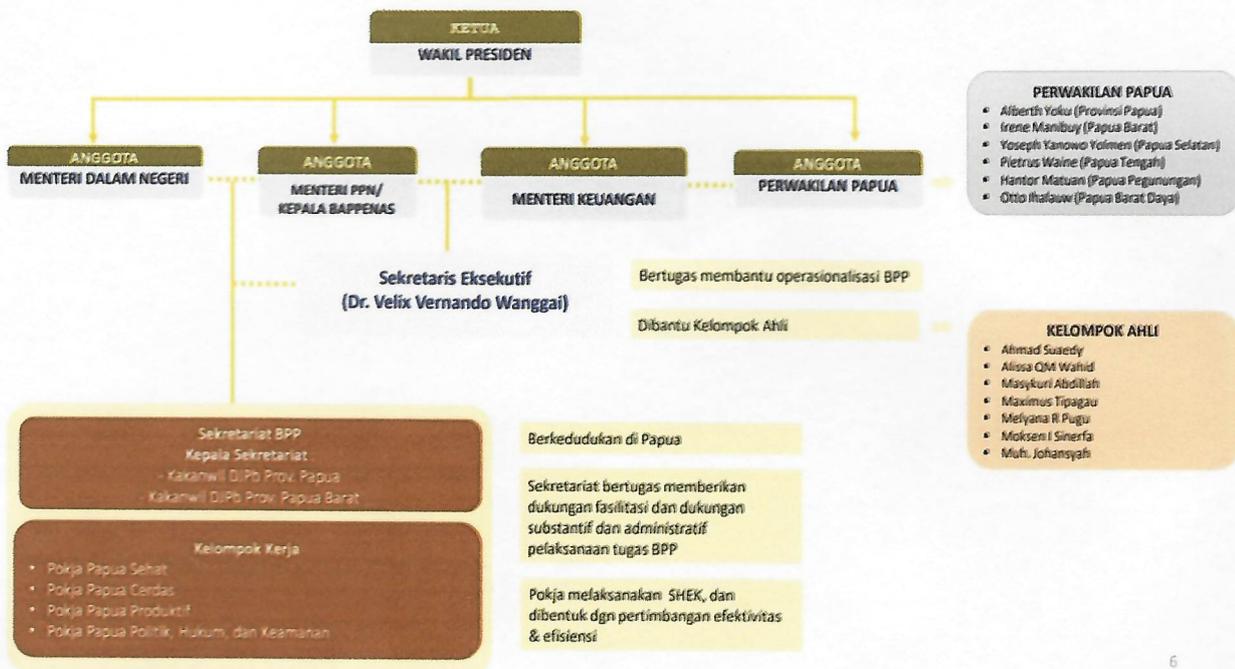
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
7. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua;
8. Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keanggotaan, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Pembidangan Tugas Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
9. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-3/SETBPP/JYP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua.
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-1/SET/JYP/2025 tentang Penetapan Tim Dukungan Administratif dan Tim Dukungan Substantif Sekretariat Badan Pengarah Papua.

1.3 Ringkasan Kelembagaan

1.3.1 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.3.2 Struktur Kelembagaan



6

1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk

- Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
- e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja

Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Papua. Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Papua dalam:

- a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua; dan
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lem.baga dan pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Konsultasi dan kordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- e. Membantu Sekretariat Badan Pengarah Papua dalam komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota" dengan masyarakat di Provinsi Papua;
- f. Menyusun laporan kelompok kerja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan Pengarah Papua.

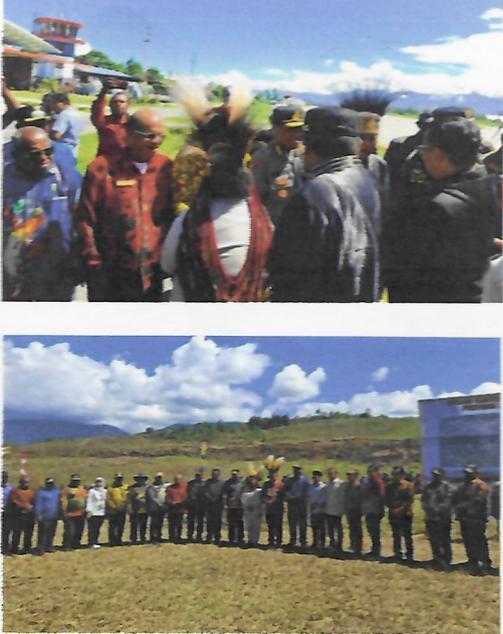
BAB II PEMBAHASAN

Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya per Bulan Mei tahun 2025 antara lain:

2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Hantor Matuan,S.IP.

Kegiatan 1	
Nama Kegiatan	: Kunjungan Kerja Wakil Menteri Dalam Negeri dan Ketua Tim Komisi II DPR RI beserta rombongan dalam rangka Peninjauan KIPP dan Evaluasi Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025, bertempat di Gunung Susu Taman Biologi LIPI, Gereja Baptis Wesaroma di Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Mengunjungi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPPP) di Gunung Susu taman Biologi LIPI yang menjadi lokasi baru pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan dan evaluasi daerah otonom Baru Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	: Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri, Ketua Tim Komisi II DPR RI, Perwakilan dari Kementerian BAPPENAS-RI, PUPR-RI, beserta Rombongan dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	: Harmonisasi
Misi/Keterangan	: Anggota BP3OKP
Hasil Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dialog dan evaluasi di Gereja Wesaroma Pikhe, agenda ini mencakup pembahasan isu strategis seperti inflasi daerah serta pemaparan dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terkait capaian awal dan tantangan di daerah otonomi baru (DOB) 2. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari evaluasi nasional terhadap empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Provinsi Papua Pegunungan menjadi salah satu fokus utama evaluasi oleh Komisi II DPR RI, sebagai bagian dari komitmen negara dalam memastikan keberhasilan pemekaran wilayah dan percepatan pembangunan di Papua.

<p>Dokumentasi Kegiatan</p>	<p>:</p>	
-----------------------------	----------	--

Kegiatan 2		
<p>Nama Kegiatan</p>	<p>:</p>	<p>Musrembang Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)</p>	<p>:</p>	<p>Dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025, bertempat di Ballroom Hotel Pilamo.</p>
<p>Tujuan Pelaksanaan Kegiatan</p>	<p>:</p>	<p>Dalam rangka pelaksanaan Musyawara Percepatan Pembangunan Daerah untuk penyusunan RKPD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2026.</p>
<p>Peserta Kegiatan</p>	<p>:</p>	<p>Kementrian Lembaga, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah 8 Kabupaten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah</p>
<p>Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan</p>	<p>:</p>	<p>Koordinasi</p>
<p>Misi/Keterangan</p>	<p>:</p>	<p>Anggota BP3OKP</p>
<p>Hasil Kegiatan</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekda Provinsi Papua Pegunungan dalam sambutannya di acara penutupan Musrembang untuk penyusunan RKPD PPP Tahun 2026, menekankan masing-masing OPD mohon sinkronisasikan dalam menjalankan Program Prioritas yang telah di tetapkan. 2. Kerja sesuai dengan hasil Musrembang tidak keluar dari RIPPP dan RAPPP.

<p>Dokumentasi Kegiatan</p>	<p>:</p>	
-----------------------------	----------	---

Kegiatan 3		
<p>Nama Kegiatan</p>	<p>:</p>	<p>Rapat Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan bersama pokja membahas rencana pembangunan Koperasi Merah Putih di Provinsi Papua Pegunungan.</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)</p>	<p>:</p>	<p>Dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Mei 2025, bertempat di Ruang Kerja Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan</p>
<p>Tujuan Pelaksanaan Kegiatan</p>	<p>:</p>	<p>Pertemuan ini membahas mengenai koperasi yang ada di Provinsi Papua Pegunungan masih sangat minim yaitu satu koperasi dan perlu ada penambahan pembangunan koperasi mengingat harga sembako di Papua Pegunungan yang mahal.</p>
<p>Peserta Kegiatan</p>	<p>:</p>	<p>Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan bersama Pokja.</p>
<p>Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan</p>	<p>:</p>	<p>Sinkronisasi dan Evaluasi</p>

Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	<p>Rapat Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Bersama Anggota Pokja dalam rangka menjelaskan Eksistensi dan Tupoksi BP3OKP dan Pokja di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan berjalan baik dan lancar adapun hasil rapat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan akan mengawal dan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Dinas Koperasi Provinsi Papua Pegunungan Bapak Alpius Yigibalom untuk membahas rencana pembangunan koperasi di Provinsi Papua Pegunungan, mengingat Koperasi di Provinsi Papua Pegunungan hanya ada satu 2. Rencana Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan bersama Pokja Papua Produktif akan menghadap langsung dan membahas rencana pembangunan Koperasi ke Kementerian Sosial RI
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Rapat Rutin Koordinasi Teknis Sekretariat DOB KPPN Wamena bersama BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	7 s.d. 9 Mei 2025, bertempat di Aula Kantor KPPN Wamena.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan sinergi
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Pokja BP3OKP, Staff BP3OKP, Sekretariat DOB KPPN Wamena.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Koordinasi dan Evaluasi

Misi/Keterangan	: BP3OKP
Hasil Kegiatan	: Rapat berjalan dengan lancar, Bapak Amran Sakiran selaku PPK BPP Papua Pegunungan mengharapkan anggaran yang ada dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan dengan adanya anggaran untuk BPP ini dapat mendorong Anggota BPP dan pokja untuk melaksanakan Program Kerja yang sudah di susun dalam RKP, selain itu juga Anggota Badan Pengarah Papua Pegunungan, Bapak Hantor Matuan mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat BPP dalam hal ini KPPN Wamena yang sudah banyak membantu administrasi BPP dan diharapkan kerjasama yang baik antar Sekretariat dan BPP Provinsi Papua Pegunungan dan mengharapkan untuk seluruh pokja dapat melaksanakan program, tugas dan fungsinya masing-masing.
Dokumentasi Kegiatan	: 

Kegiatan 5	
Nama Kegiatan	: Rapat Zoom Meeting Sosialisasi Anti Korupsi Pemerintah Daerah se-Tanah Papua.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025, bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Membahas Sosialisasi Anti Korupsi Pemerintah Daerah se-Tanah Papua.
Peserta Kegiatan	: Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Pemerintah Provinsi, Badan di Tingkat Provinsi, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten

Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	: SHEK
Misi/Keterangan	: BP3OKP
Hasil Kegiatan	: Dalam rapat ini membahas mengenai peningkatkan pemahaman terhadap konsep integritas dalam pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kesadaran tentang resiko korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah serta untuk meningkatkan integritas, profesionalisme dan akuntabilitas pejabat birokrasi dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan serta berorientasi pada kepentingan publik Disampaikan juga bahwa akan ada pertemuan tinjau lanjut antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dan Pemerintah 6 Provinsi se Tanah Papua.
Dokumentasi Kegiatan	: 

Kegiatan 8	
Nama Kegiatan	: Pertemuan Bersama Tokoh Masyarakat Kabupaten Nduga Dalam Rangka Menanggapi Situasi Masalah Penembakan di RSUD Wamena.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Dilaksanakan pada hari Jumat, 30 Mei 2025, bertempat di Aula kantor KPPN Wamena.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan Menggelar Pertemuan Bersama Tokoh Masyarakat Kabupaten Nduga Dalam Rangka Menanggapi Situasi Masalah Penembakan di RSUD Wamena.
Peserta Kegiatan	: Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Masyarakat dan Tokoh Adat Kabupaten Nduga.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	: Koordinasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	: BP3OKP
Hasil Kegiatan	: <p>Pertemuan yang dipimpin oleh Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, Hantor Matuan, S.IP, bersama perwakilan tokoh masyarakat Nduga dan Koordinator HAM Provinsi Papua Pegunungan bertujuan untuk merespons insiden penembakan terhadap anggota Polres Jayawijaya, Bripta Marsidon Debataraja, yang terjadi di RSUD Wamena pada 28 Mei 2025. Pertemuan ini menyimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu Penyelidikan Mendalam dan Klarifikasi Kasus Seluruh pihak sepakat bahwa kasus penembakan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) harus diselidiki secara menyeluruh dan objektif. Ditekankan perlunya Kapolres Jayawijaya memberikan penjelasan lengkap kronologi kejadian untuk menemukan titik terang. 2. Pisahkan Masalah Penembakan dan Pengungsi Ditekankan agar tidak mencampuradukkan insiden penembakan dengan keberadaan pengungsi masyarakat Nduga di Wamena. Masyarakat Nduga memiliki hak hidup dan perlindungan sebagai warga negara Indonesia. 3. Tidak Menggeneralisasi Pelaku Berdasarkan Asal Daerah Pernyataan atau asumsi bahwa pelaku berasal dari Nduga harus disikapi hati-hati. Perlu pembuktian yang sah dan tidak menjadikan seluruh komunitas pengungsi sebagai pihak yang disalahkan. 4. Wamena sebagai Titik Sentral Papua Pegunungan Harus Dijaga Semua pihak menegaskan pentingnya menjaga keamanan Wamena sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan yang menjadi pusat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi delapan kabupaten di sekitarnya. Keseluruhan pertemuan ini menekankan pendekatan yang adil, manusiawi, dan kolektif dalam menyelesaikan persoalan

		keamanan dan pengungsi di Wamena, serta pentingnya mencegah konflik horizontal dan menjaga stabilitas sosial di wilayah Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Fransiscus Elosak, S.H.,M.H

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Hasil Pertemuan bersama Pemda Kabupaten Jayawijaya mengenai aksi penembakan di Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2025, bertempat di Kantor Bupati Wamena.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Menyampaikan Hasil Rapat bersama BPP dan Masyarakat Kabupaten Nduga mengenai aksi penembakan dan pengungsi Kabupaten Nduga
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP Papua Pegunungan, Pokja Papua Polhukam, Bupati dan Pemda Kabupaten Jayawijaya.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Evaluasi dan Koordinasi

Misi/Keterangan	:	Papua Polhukam
Hasil Kegiatan	:	Penyampaian hasil rapat bersama masyarakat Kabupaten Nduga di terima oleh Bupati Jayawijaya dan kemudian akan bersama-sama mengawal permasalahan yang terjadi di Jayawijaya, kemudian Bupati menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan keadaan saat ini.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Menghadiri dan Mendampingi Kejuaraan Nasional Taekwondo Papua Open 2025 di Jayapura.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 3 Mei 2025, bertempat di Gor Cendrawasi Jayapura
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Persiapan untuk menghadapi kejuaraan PON beladiri di kodus - jateng bulan oktober 2025
Peserta Kegiatan	:	Sekda Provinsi Papua, Ketua Dpr Provinsi Papua, Kadispora Provinsi Papua, Semua Atlet, Pelatih Dan Manager Taekwondo

Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	Mengkoordinasikan dan mengevaluasi untuk menjangkau atlet yang berbakat diseluruh wilayah Papua Raya untuk dipersiapkan di kejuaraan Daerah Nasional maupun internasional
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Sosialisasi Usaha Koperasi Gapensi Sulah Noken Wamena Untuk Menuju Koperasi Merah Putih
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025, bertempat di Aula Wisata Pemancingan Grand Wesaput
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Berdirinya Koperasi ini untuk menghidupkan kembali kegiatan dari para anggota seperti usaha hasil kelompok tani sayur, ternak bani, kolam ikan, kios dan hasil hutan
Peserta Kegiatan	:	Pokja Papua Produktif, Kepala Dinas PTSP, Para Kelompok Tani, Ketua Koperasi Dan Tokoh Pemuda
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi dan Evaluasi.

Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	Mengawal dan koordinasi berdirinya koperasi ini untuk menghidupkan kembali usahanya untuk menuju koperasi desa merah putih. Evaluasi kegiatan usaha para kelompok tani agar lebih meningkatkan produk usahanya
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Rakernas DMI di Jakarta, dan kegiatan MOU dengan 4 kementrian.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 19 Mei 2025 bertempat di Tavia Haritage Hotel - Cempaka Putih Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	DMI melakukan kerja sama dengan Pusat, daerah dan kementrian dan melakukan MOU bersama : 1. Menteri ATR dan Pertanahan 2. Menteri Tenaga Kerja 3. Menteri MendikDasMem 4. Dirut Perumahan BTN 5. Dirut BAZNAS

Peserta Kegiatan	:	Jusuf Kalla (Mantan Wapres), Pokja Papua Produktif, Ketua & Wakil Sekretaris Pusat dan Wilayah Provinsi Seindonesia, 4 Menteri, Ketua Baznas Pusat dan Dirut BTN.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Harmonisasi dan Sinkronisasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	<p>1. Melakukan Koordinasi, Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap 4 kementerian untuk bisa meningkatkan perekonomian, SDM, Pendidikan dan Sosial agar kedepan Prov.PP tidak berdampak kategori Kemiskinan ekstrim dan Inflasi tertinggi.</p> <p>2. Evaluasi agar kedepan masalah tanah, SDM, Pendidikan, pembangunan gedung dan Sosial agar lebih baik, unggul, berkualitas dan bisa tepat sasaran sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat .</p>
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 4	
Nama Kegiatan	: Penyerahan Tropi Terbaik Pada Kejuaraan Taekwondo Papua Open Kepada Gubernur Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025, bertempat di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Upacara dan penyerahan dalam rangka mengapresiasi atlet dan Tim Taekwondo yang di pimpin langsung oleh Bapak Gubernur selaku Pembina Olahraga dengan memberi penghargaan dan motivasi baik moril maupun uang pembinaan .
Peserta Kegiatan	: Gubernur, Kadispora, Kepala OPD, Atlet, Pelatih Dan Manager.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	: Harmonisasi
Misi/Keterangan	: Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	: Memberikan apresiasi dari Pemerintah terhadap perjuangan Para Atlet2 Taekwondo yang berbakat dalam hal ini Kontingen Atlet Taekwondo Provinsi Papua Pegunungan mendapat Mendali emas 3, Perak 2 dan perunggu 17. Berkoordinasi dengan Pemerintah agar pemerintah memberi kesempatan kepada Talenta2 atlet berbakat untuk latihan dan mengejar prestasi untuk membawa nama baik PROV. PP
Dokumentasi Kegiatan	: 



Kegiatan 5	
Nama Kegiatan	: Meeting Zoom Sinkronisasi Dan Koordinasi BP3OKP - Papua Produktif Dengan Persiapan Program Pemerintah Pembentukan Koperasi Merah Putih Di Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2025 bertempat di Kantor BP3OKP Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Membahas Forum Diskusi Koperasi Merah Putih di Tanah Papua bersama Kementerian Koperasi RI

Peserta Kegiatan	:	Deputi Kemeterian Koperasi, Pokja Papua Produktif Kadis Koperasi seluruh Papua, Anggota Gapoktan dan Pelaku usaha UMKM
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	<p>1. Berkoordinasi, Harmonisasi dan Evaluasi kepada kementerian Koperasi di provinsi dan kabupaten untuk menumbuh kembangkan Koperasi2 yang selama ini Pasif dan mati agar bisa digerakan kembali untuk bergabung dengan program pemerintah yaitu Koperasi Desa Merah Putih.</p> <p>2. Berkoordinasi ke Semua anggota dan pengurus Koperasi bahwa kehadiran program Koperasi Desa Merah Putih Bisa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi kemiskinan Ekstrim serta Inflasi yang selama ini melanda Prov PP</p>
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 6	
Nama Kegiatan	: Audensi membahas Penanggulangan Masalah Inflasi Dan Kemiskinan Ekstrim Bersama Ketua DPRD Provinsi Papua Pegunungan dan Sekda Kabupaten Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025, bertempat di Ruang kerja Sekda Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Membahas mengenai : 1. Provinsi Papua Pegunungan sebagai Provinsi baru yang menempati rangking pertama Kemiskinan Ektrim dan Inflasi di seluruh Indonesia 2. Perputaran Ekonomi Di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan yang sangat lemah dan berdampak Negatif terhadap kehidupan masyarakat bawah
Peserta Kegiatan	: Ketua DPRP Provinsi Papua Pegunungan, Pokja Papua Produktif Sekda Kabupaten Jayawijaya.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	: Harmonisasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	: Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	: 1. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para pimpinan dan OPD Pemerintah Provinsi dan semua 8 Kabupaten terutama Kabupaten Induk Jayawijaya harus segera ambil tindakan untuk melakukan tindakan dan membantu cepat dalam meningkatkan pergerakan ekonomi diberbagai sektor. 2. Berkoordinasi dengan para pelaku usaha terutama ekonomi kreatif/UMKM, pengusaha barang dan jasa dan para penyedia sarana prasarana barang dan jasa agar tetap bersinergi meningkatkan kegiatan usahanya sesuai produk dan bidangnya masing-masing. 3. Berkoordinasi agar pemerintah tetap membantu masyarakat yang terkena dampak.
Dokumentasi Kegiatan	: 



2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan
 Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd)

Kegiatan 1	
Nama Kegiatan	: Rapat Rekonsiliasi Data Beasiswa Unggul Papua (SUP) Dalam Negeri dan Luar Negeri Tahun 2025.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 7 Mei 2025, bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Menindaklanjuti surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor : 000.15/27.34/SET tanggal 8 April 2025 perihal Rekonsiliasi Dana Penerima Beasiswa SUP Dalam dan Luar Negeri Tahun 2025.
Peserta Kegiatan	: Kemendagri RI Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Staff Ahli bidang Pengembangan Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan, Pj. Sekda Provinsi Papua, Perwakilan Anggota BPP Pokja Papua Cerdas, Inspektorat Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pendidikan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	: Koordinasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	: Pokja Papua Cerdas.
Hasil Kegiatan	: Kegiatan pertemuan menindaklanjuti surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan perihal Rekonsiliasi Dana Penerima Beasiswa SUP Dalam dan Luar Negeri Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan mengawal agar beasiswa yang diberikan ini dapat tepat sasaran dan dapat membantu OAP.

<p>Dokumentasi Kegiatan</p>	<p>:</p>	
-----------------------------	----------	--

Kegiatan 2		
<p>Nama Kegiatan</p>	<p>:</p>	<p>Rapat dengan tim Corban University membahas beasiswa oleh Pemerintah Provinsi Papua di Corban University, Oregon USA.</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)</p>	<p>:</p>	<p>Rapat dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025, bertempat di Sekolah Harapan Sentani, Provinsi Papua.</p>
<p>Tujuan Pelaksanaan Kegiatan</p>	<p>:</p>	<p>Membahas beasiswa oleh Pemerintah Provinsi Papua di Corban University, Oregon USA.</p>
<p>Peserta Kegiatan</p>	<p>:</p>	<p>Pokja Papua Cerdas bersama tim Corban University</p>
<p>Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan</p>	<p>:</p>	<p>SHEK</p>
<p>Misi/Keterangan</p>	<p>:</p>	<p>Pokja Papua Cerdas</p>
<p>Hasil Kegiatan</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolong mahasiswa SUP (Siswa Unggul Papua) yang dikirim dan diberikan beasiswa oleh Pemerintah Provinsi Papua di Corban University, Oregon USA. 2. Alumni mahasiswa diberi peluang bekerja di pemerintah dan LSM sesuai jurusan. 3. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan belum bisa mengirim mahasiswa sampai dengan mahasiswa yang sedang kuliah saat ini wisuda dan pulang kembali ke Papua sesuai arahan dari Mendagri.

Dokumentasi Kegiatan	: 
----------------------	--

Kegiatan 3	
Nama Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua Pegunungan dalam bidang Pendidikan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: 12 Mei 2025, bertempat di sekolah Papua Harapan Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dan membantu fasilitasi Yayasan Papua Harapan membangun Sekolah Berkualitas, TK SD.
Peserta Kegiatan	: Pokja Papua Cerdas,
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	: Sinkronisasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	: Pokja Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua Pegunungan mulai dari TK, SD kerjasama dengan Pemda Kabupaten Jayawijaya dan direncanakan akan lakukan yang sama di Kabupaten Tolikara. Sejauh ini Pokja Papua Cerdas telah melakukan koordinasi dengan Bupati Kabupaten Tolikara untuk menerima kunjungan kerja di Kabupaten Tolikara dalam Bulan Juni 2025

<p>Dokumentasi Kegiatan</p>	
-----------------------------	---

2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan
 Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M)

Kegiatan 1	
Nama Kegiatan	: Notula Audiensi Pokja Papua Sehat BP3OKP bersama Kepala Kantor BPJS Kantor Cabang Wamena
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Audiensi dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Mei 2025 bertempat di Kantor BPJS Cabang Wamena.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Untuk mengetahui peran dan fungsi BPJS dalam pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	: Anggota Kelompok Kerja Papua Sehat, Staff BPP Papua Pegunungan, Kepala Kantor BPJS Wamena
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	: Koordinasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	: Papua Sehat
Hasil Kegiatan	: Audiensi yang dilaksanakan antara BPJS Kesehatan Cabang Wamena dan Pokja Papua Sehat BP3OKP bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan layanan kesehatan, khususnya bagi Orang Asli Papua di wilayah Pegunungan Papua. Kabupaten Jayawijaya telah menunjukkan kemajuan dengan mencatat kepesertaan JKN sebesar 73,30% dari total penduduk. Namun, masih terdapat tantangan besar seperti penurunan jumlah peserta PBI JK, banyaknya peserta nonaktif, serta keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, khususnya dokter umum dan dokter gigi di FKTP. Rekredensialing fasilitas kesehatan juga menunjukkan bahwa sebagian besar FKTP belum memenuhi standar mutu. Kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah

		daerah, BPJS, dan mitra strategis sangat penting untuk mengoptimalkan penyelenggaraan JKN dan menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas di Jayawijaya.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Hasil Pertemuan Koordinasi Pokja Papua Sehat BP3OKP bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Mei 2025, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Rapat Koordinasi Data Kesehatan Orang Asli Papua antara BPP Pokja Papua Sehat dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya.
Peserta Kegiatan	:	Pokja Papua Sehat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan, Staff BP3OKP.

Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	<p>Kegiatan pertemuan antara anggota BPP POKJA Papua Sehat dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya tentang keadaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya berjalan baik dan lancar sesuai yang direncanakan oleh Anggota BPP POKJA Papua Sehat, dengan hasil sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Dinas Kesehatan Kab. Jayawijaya sedang mengidentifikasi persoalan keadaan pelayanan kesehatan yang sedang jalan dengan menggunakan Analisa SWAT. 2. Masyarakat yang sakit dan perlu diobati, namun tidak dapat pelayanan Kesehatan di rumah sakit dikarenakan tidak punya kartu BPJS kesehatan, karena masyarakat tidak memiliki KK dan NIK. 3. Kurangnya ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan, serta obat dan alat Kesehatan, karena kekurangan data di Dinas Kesehatan. 4. Angka kelahiran dan kematian tidak jelas, membuat tidak dapat di ukur pertumbuhan dan perkembangan IPM Orang Asli Papua. 5. Belum ada data yang valid berapa jumlah Orang Asli Papua? Maka perlu ada regulasi data Orang Asli Papua, karena data penduduk yang ada merupakan data KPU/Politik bukan data asli. 6. Rencana Kepala Dinas Kesehatan akan dibentuk Satgas Jayawijaya Sehat, mereka ini yang akan patroli ke rumah-rumah, dengan moto, "keluarga sehat berarti dengan sendirinya lingkungan kampung itu sehat, kalau kampung/desa itu sehat, dengan sendirinya distrik itu sehat menuju Kabupaten Jayawijaya sehat". Maka 328 Kampung wajib aktifkan Posyandu dan bikin api. 7. Perlu ada penambahan tenaga ahli medis seperti dokter specialist, perawat dan bidan. 8. Setiap tahun akan menyekolahkan lima anak-anak Orang Asli Papua untuk menganyam Pendidikan di Kedokteran. 9. Mendorong peningkatan kapasitas perawat dengan menyekolahkan perawat sesuai dengan bidang mereka, memperkuat akademi keperawatan yang ada.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan Tindak Lanjut Instruksi Bupati Kabupaten Jayawijaya mengenai bencana banjir di Jayawijaya.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Mei 2025, bertempat di Kantor Wilayah Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Wilayah IV Papua, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Menindaklanjuti instruksi Bupati Kabupaten Jayawijaya mengenai bencana banjir di Kabupaten Jayawijaya.
Peserta Kegiatan	:	Anggota BPP Pokja Papua Sehat beserta staff BPP, Badan Pengurus Harian (BPH) Wilayah IV Papua, Ketua-ketua Klasis Gereja Kemah Injil (GKII) Wilayah IV, Hambah-hambah Tuhan yang gerejanya terkena dampak musiba banjir.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	<p>Identifikasi persoalan daerah yang terkena dampak musibah banjir</p> <p>Pembagian tugas pembentukan tim dalam penanganan musibah banjir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Koordinator Tim Doa dan Puasa, akan ada Kegiatan doa dan puasa untuk mendukung dalam secara spiritual. ➤ Koordinator sekaligus membuka posko penanganan sumbangan dalam rangka mendukung umat yang terdampak banjir. ➤ Koordinator komunikator/humas.

Dokumentasi
Kegiatan

:



BAB III PENUTUP

Penerapan Otonomi Khusus di Papua telah memasuki tahap baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan didukung oleh pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melalui Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Tugas utama BPP mencakup sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan di Papua. Selain berfokus pada pembangunan fisik dan kesejahteraan, BPP juga berkomitmen memastikan partisipasi aktif masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dan menjembatani kebutuhan mereka dengan kebijakan pemerintah pusat. Di bawah rencana induk yang terukur melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2023, BPP berperan penting dalam mengarahkan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi implementasi Otsus Papua.

Dengan adanya BPP yang memiliki wewenang dan struktur yang jelas, diharapkan percepatan pembangunan di Papua dapat terlaksana sesuai dengan rencana induk yang telah disusun hingga tahun 2041. Kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat Papua sangat diperlukan agar pelaksanaan Otsus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kesetaraan bagi seluruh masyarakat Papua. Evaluasi berkala dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ini untuk mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, damai, dan produktif.

Kegiatan yang di lakukan oleh BP3OKP dalam hal ini anggota dan juga masing-masing pokja berhubungan dengan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi terutama dalam era kepemimpinan baru Gubernur dan Bupati diharapkan BP3OKP dapat mengambil peran penting dalam pembangunan di Papua Pegunungan.

**Wamena, 5 Juni 2025
BP3OKP
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**



HANTOR MATUAN, S.IP.